

**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP KEBIJAKAN
THAILAND MENDORONG INDONESIA MENERAPKAN PERJANJIAN
ASEAN *AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (AATHP)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALFANSYAH YOULFI

14323111

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- 2019

**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP KEBIJAKAN THAILAND
MENDORONG INDONESIA MENERAPKAN PERJANJIAN ASEAN *AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana 1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALFANSYAH YOULFI

14323111

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP KEBIJAKAN THAILAND
MENDORONG INDONESIA MENERAPKAN *PERJANJIAN ASEAN AGREEMENT*
*ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
25 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

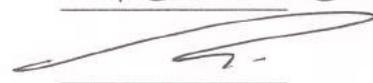


Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan


Karina


PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alfansyah Youlfi
No. Mahasiswa : 14323111
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis *Decision Making Process* Terhadap Kebijakan Thailand
Mendorong Indonesia Menerapkan Perjanjian Asean *Agreement*
On Transboundary Haze Pollution (Aathp)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 November 2019

Yang menyatakan



Alfansyah Youlfi

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Kedua Orang Tuaku”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Kurnain dan Ibunda Nurlaili yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

“Kakak-kakakku”

Ucapan terima kasih kepada saudaraku tersayang Indah dan Lala atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN MOTTO

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah

pun”

Soekarno

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal”

Yakin Usaha Sampai

HMI

Ya Allah, ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku,
uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar mereka memahami perkataanku

Q.S Thaha ayat 24

لَا يَجِدُكَ إِلَّا خَشَعًا لِّرَبِّهِ ۗ

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Thailand Terkait Deforestasi dan Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015-2018” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta alam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

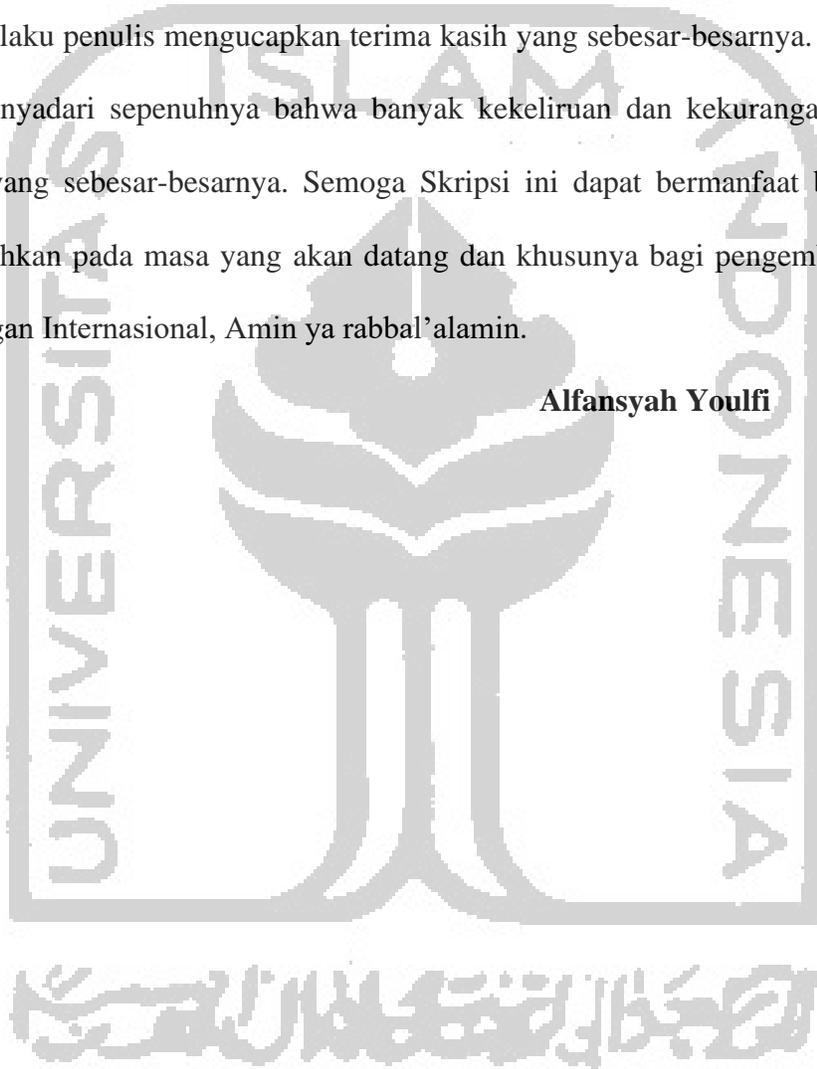
3. Bapak Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, membimbing, nasihat, saran, dan telah membantu penulis.
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Serta telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta ilmunya dari awal penulisan proposal sampai penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
6. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
7. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'alam.
8. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Syafrullah dan Ibunda Epijah yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
9. Saudara kandung yaitu kakak sekalian atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Allah SWT yang sudah mempertemukan saya dengan Gharby Saidi di Jogja dan menjadi sahabat terbaik selama kuliah. See You On The Top

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khususnya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'amin.

Alfansyah Youlfi



DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	1
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Signifikansi	Error! Bookmark not defined.
1.5 Cakupan penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1.7 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
<i>Rational Choice Theory (Decision-Making).....</i>	Error! Bookmark not defined.

1.8 Metode Penelitian..... Error! Bookmark not defined.

1.8.1 Jenis Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

1.8.2 Subjek Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

1.8.3 Alat Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**

1.8.4 Proses Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

BAB II KONDISI POLITIK DOMESTIK THAILANDError! Bookmark not defined.

2.1 Birokrasi Error! Bookmark not defined.

2.2 Partai Politik..... Error! Bookmark not defined.

2.3 Kelompok Yang Berkepentingan Error! Bookmark not defined.

2.4 Media Massa..... Error! Bookmark not defined.

BAB III KONDISI EKONOMI, KEAMANAN, DAN KONTEKS INTERNASIONAL

.....Error! Bookmark not defined.

3.1 Kondisi Ekonomi Thailand Error! Bookmark not defined.

3.2 Keamanan: Kemampuan Militer Thailand..... Error! Bookmark not defined.

3.3 Konteks Internasional: ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*Error!

Bookmark not defined.

BAB IV.....Error! Bookmark not defined.

PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

4.1 Kesimpulan..... Error! Bookmark not defined.

4.2 Saran Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

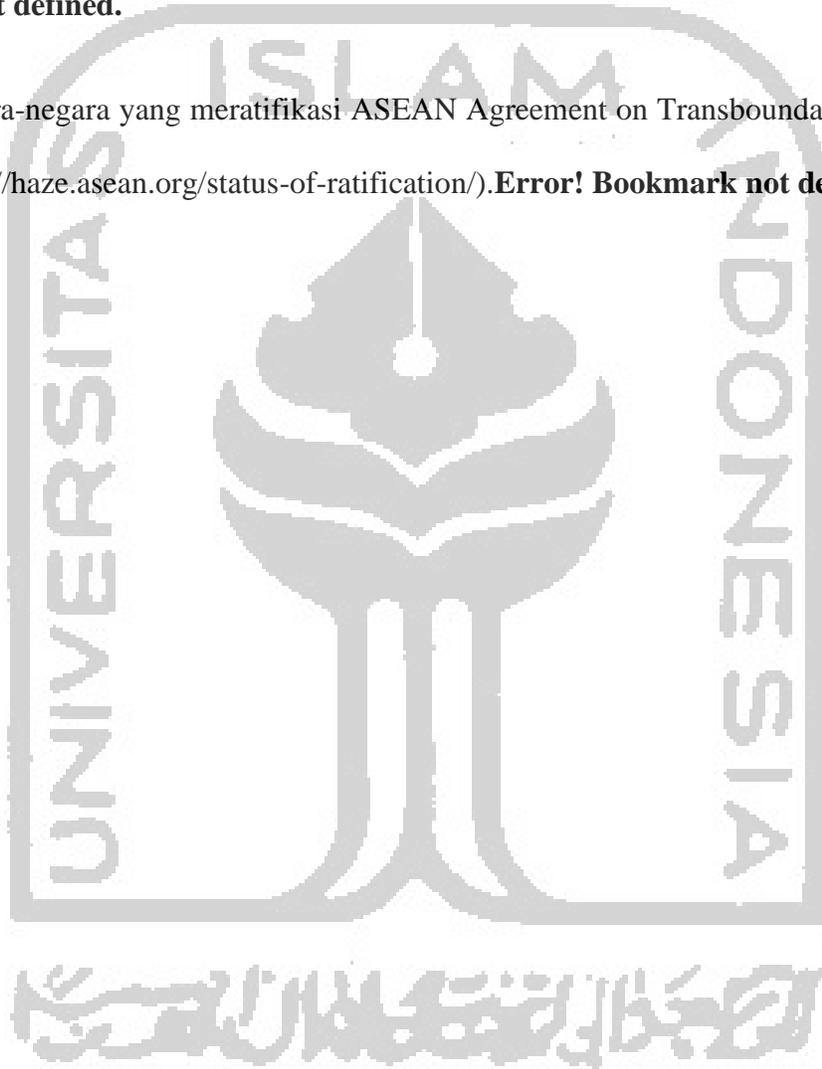


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Media Massa Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2: Alokasi Pengeluaran Pertahanan Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3: Negara-negara yang meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Sumber; <http://haze.asean.org/status-of-ratification/>).**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Proses Pengambilan Kebijakan (Coplin, 1992).**Error! Bookmark not defined.**



ABSTRAK

Adanya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan timbulnya kabut asap dan polusi udara yang telah menimbulkan dampak ke beberapa negara di Asia Tenggara. Pemerintah Thailand bersama negara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun regional dalam hal ini melakukan kerja sama yang diharapkan dapat menanggulangi dampak dari kabut asap yang terjadi. Dengan menggunakan analisis *Rational Choice Theory*, maka dari itu dalam merespon kebakaran hutan yang berdampak di Thailand dan bertanggung jawab, yaitu: birokrat dalam hal ini kementerian, partai politik dalam hal ini aktor politik, kelompok yang berkepentingan, media massa, keamanan dan militer, dan konteks internasional berdasarkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

Kata Kunci: Indonesia, Thailand, Deforestasi dan Kebakaran Hutan, Kabut Asap, dan *Rational Choice Theory*.

ABSTRACT

Deforestation and forest fires in Indonesia have caused haze and air pollution which has affected several countries in Southeast Asia. The Government of Thailand together with Southeast Asian countries, both bilaterally and regionally, in this case, is conducting cooperation that is expected to overcome the effects of the haze. By using the Rational Choice Theory analysis, therefore in responding to forest fires that have an impact on Thailand and are responsible, namely: bureaucrats in this case ministries, political parties, in this case political actors, interest groups, mass media, security and military, and international context based on the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Keywords: *Indonesia, Thailand, Deforestation and Forest Fires, Smoke Haze, Rational Choice Theory, and ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan memiliki wilayah yang luas. Negara ini juga menjadi negara yang banyak didatangi oleh para wisatawan. Selain itu, Thailand juga menjadi negara dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di antara negara Asia Tenggara.

Dalam permasalahan lingkungan, menjadi penting menjaga lingkungan itu sendiri dari kerusakan yang sering terjadi akibat berbagai faktor. Sebab kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan dampak terhadap sosial, budaya, ekonomi, ekologis, kerusakan lingkungan, hubungan antar negara, perhubungan dan pariwisata (Rumajomi, 2006, p. 8). Selain itu, dampak dari dari kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor, diantaranya: kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan transportasi. Sehingga dengan adanya dampak terhadap lingkungan, kebakaran hutan di Indonesia telah memberikan dampak pada lingkungan secara signifikan. Di mana akibat hal tersebut menimbulkan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Suryani, 2012, p. 63).

Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh adanya deforestasi yang dilakukan dengan tujuan ingin membuka lahan. Selain itu, kabut asap ini terjadi karena kebakaran hutan di wilayah Indonesia juga menimbulkan dampak negatif dan kerugian di berbagai sektor (Suryani, 2012, p. 64). Sehingga isu-isu deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi setiap tahun dengan intensitas kebakaran hutan yang tinggi. Di mana Thailand merupakan negara yang terkena dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi yaitu kabut asap lintas batas negara.

Permasalahan-permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Dampak dari deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi akan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu, akibat dari adanya deforestasi dan kebakaran hutan tersebut telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan. Di mana kebakaran hutan di Indonesia mulai terjadi dan tercatat sejak abad ke-19 (Varkley, 2013, p. 201). Sehingga kebakaran hutan ini telah menjadi masalah tahunan bagi Indonesia. Sedangkan bagi Thailand, kabut asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia juga menjadi masalah dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan memiliki hutan yang luas dan telah lama dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, dari hutan yang dimiliki tersebut menimbulkan permasalahan yang sering terjadi yaitu deforestasi dan kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seringkali sebagian besar disebabkan yang menjadi penyebabnya yaitu manusia yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan (Tanjung, 2016). Apalagi akibat adanya deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Sehingga hal tersebut telah menjadi isu lingkungan dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2015, kasus kebakaran hutan merupakan bencana paling buruk yang menimpa enam dari sepuluh negara anggota ASEAN, termasuk Thailand Selatan dan Vietnam (Singapore Institute of International Affairs, 2016, p. 2). Di mana dampak bagi Thailand akibat kabut asap tersebut membuat industri pariwisata Thailand bermasalah. Sehingga dampak dari kabut asap yang merambah wilayah Thailand Selatan membuat pemerintah Thailand khawatir terhadap

permasalahan tersebut. Namun, wilayah Thailand itu sendiri memang tidak lepas dari dampak kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Sebab dampak terburuk bagi Thailand yang diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia yaitu tahun 2015. Misalnya dampak dari kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 menyebabkan pemerintah Thailand menutup penerbangan sejumlah pesawat (Kompas, 2015).

Di sisi lain, baik Thailand maupun Indonesia merupakan negara yang telah menyetujui perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Perjanjian ini adalah perjanjian lingkungan semua anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengurangi polusi kabut asap. Perjanjian tersebut akhirnya mulai berlaku pada November 2003. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara tetangga untuk mengatasi masalah pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Namun, adanya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan timbulnya kabut asap dan polusi udara yang telah menimbulkan dampak ke beberapa negara di Asia Tenggara.

Dengan demikian, Thailand berusaha mengatasi dampak dari kabut asap yang terjadi dengan menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Sebab akibat permasalahan kabut asap ini membuat hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia menjadi terganggu. Akan tetapi, pada dasarnya dalam bidang kerja sama bilateral, hubungan antara kedua negara selama ini masih berjalan dengan baik. Kedua negara ini secara bersama-sama bekerja sama dalam menangani permasalahan kebakaran lahan yang terjadi. Pemerintah Thailand melakukan upaya dengan menawarkan beberapa solusi kepada pemerintah Indonesia. Sehingga kedua negara ini bekerja sama dalam menangani permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: **Mengapa Thailand berupaya mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dengan menggunakan *decision making*?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini skripsi ini, penulis memiliki tujuan yaitu:

- Untuk menganalisis, memaparkan, dan mengkaji terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) sehingga dapat mengetahui kepentingan, respon, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Thailand dalam menangani kasus tersebut dengan melalui kerja sama antara Thailand dan Indonesia.

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, judul dan rumusan masalah yang akan dibahas sangat relevan terhadap fenomena yang terjadi dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis berharap nantinya penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga menurut penulis, penelitian ini dapat memiliki manfaat, yaitu:

- Dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang memiliki minat dalam hubungan internasional terkait hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia, khususnya terhadap analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

- Dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak, khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki minat penelitian terkait kerja sama antara Thailand dan Indonesia, khususnya dalam analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

1.5 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dengan menggunakan topik/isu yang diangkat memfokuskan penelitian terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Di mana dampak deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia membuat hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia terus terganggu. Sebab sejak terjadinya kebakaran hutan di Indonesia yang menyumbang asap ke beberapa negara Asia Tenggara telah mendapatkan respon dari negara-negara yang terkena dampaknya. Sehingga respon tersebut dapat menyebabkan hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara terganggu, khususnya Thailand yang diakibatkan oleh dampak kabut asap kiriman dari Indonesia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Selain itu, meskipun ada beberapa penelitian yang sudah membahas penelitian dalam menangani kasus deforestasi dan kebakaran hutan melalui organisasi internasional ASEAN, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu lebih fokus pada analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Dimana dengan adanya upaya tersebut dapat membangun hubungan

kerja sama antara kedua negara dalam menangani kasus tersebut yang dapat berdampak positif ke berbagai bidang. Penelitian merupakan penelitian yang relevan terkait hubungan kerja sama kedua negara ini. Selain itu, dalam penelitian ini penulis memiliki batasan waktu, yaitu dari tahun 2015-2018. Sebab pada tahun 2015-2018 permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia sangat tinggi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian yang akan dibahas. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu:

Pada literatur yang berjudul “*The Politics of Deforestation in Indonesia*” (Dauvergne, 2004). Dalam literatur ini menjelaskan terkait Dalam literatur ini menjelaskan terkait bentuk politik dari pemerintahan Indonesia dalam mencari solusi terkait deforestasi. Adanya laju dan penyebab deforestasi yang terjadi di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak yang kompleks. Sehingga deforestasi yang terjadi telah menimbulkan masalah-masalah harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Jurnal yang berjudul “*Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*” (Tacconi, 2003), menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, biaya yang dikeluarkan, dan dampak kebijakan yang terjadi. Di mana kebakaran hutan disebabkan oleh masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaran

hutan itu sendiri. Sehingga terjadinya kebakaran hutan menyebabkan permasalahan semakin kompleks dan mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah kebakaran hutan dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat agar tidak terjadi permasalahan yang terus-menerus.

Jurnal yang berjudul “*Pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*” (Syaifulloh, Susilo, & Soelistijono, 2013), menjelaskan terkait isu tentang pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan yang mana organisasi regional memiliki peranan dalam membuat perjanjian dengan negara anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. Sehingga negara-negara anggota membuat perjanjian secara bersama-sama melalui ASEAN dalam menangani permasalahan kabut asap lintas negara yang telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan di Asia Tenggara.

Literatur yang berjudul “*Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security Indonesia*” (Edwards & Heiduk, 2015), menjelaskan terkait akibat pembakaran hutan dan dampak buruk yang terjadi di Indonesia melanda wilayah Asia Tenggara. Dengan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dan *Global Environmental Security* menyatakan perang terhadap kabut asap dan menyerukan penggunaan semua tindakan yang diperlukan dalam menghentikan terjadinya kebakaran hutan yang disengaja. Namun, pemerintah Indonesia hanya mampu sedikit dalam mencegah kebakaran hutan yang terjadi atau menuntut para pelaku pembakaran hutan tersebut. Sehingga dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka sekuritisasi

yang dilakukan tidak begitu berhasil karena latar belakang yang dimiliki oleh Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas.

Pada literatur yang berjudul "*Indonesia has Ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Will the Haze Disappear?*" (Sambodo, 2015), menjelaskan terkait kebakaran hutan dan kabut asap yang menjadi salah satu tantangan pada sektor lingkungan di Asia Tenggara. Di mana Indonesia telah menjadi sumber utama adanya kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Sehingga pada Indonesia meratifikasi perjanjian *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* pada bulan September 2014.

Literatur yang berjudul "*After Indonesia Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environment Governance Tool*" (Heilmann, 2015), menjelaskan terkait pada tanggal 20 Januari 2015 Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi untuk *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* ke Sekretariat ASEAN. Di mana Indonesia merupakan negara anggota ASEAN terakhir yang bergabung dalam perjanjian tersebut. Dalam literatur ini berpendapat bahwa ratifikasi Indonesia tidak akan menjadi pengubah perjanjian ini. Sebab mekanisme perjanjian terlalu lemah untuk berkontribusi banyak pada pengurangan polusi kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Perjanjian tersebut dirancang sesuai dengan cara ASEAN yang mana pendekatannya tidak mengikat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Sehingga hal ini tidak mungkin bahwa

dalam perjanjian ini akan membawa perubahan bagi negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi.

Dengan demikian, berdasarkan literatur yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan membahas analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi, deforestasi dan kebakaran hutan maupun dampak dari deforestasi dan kebakaran hutan itu sendiri merupakan sebuah permasalahan yang sangat penting. Sehingga menurut penulis, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Di mana dalam hal ini selain adanya respon dari Thailand, juga menimbulkan adanya bekerja sama kedua negara dalam menangani permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

1.7 Landasan Teori

Rational Choice Theory (Decision-Making)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Rational Choice* yang dikeluarkan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politic: Model of Decision Making Process*. Penulis melihat bahwa teori ini dapat dijadikan sebagai dasar analisis penelitian dan menganalisis kebijakan luar negeri dalam analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). *Decision Making* merupakan suatu pemilihan keputusan atau kebijakan yang mengacu pada kriteria tertentu. Proses pengambilan keputusan ini

meliputi dua alternatif atau lebih namun dalam hal ini hanya dapat memilih satu alternatif (Dagun, 2006, p. 185).

Coplin menjelaskan dalam bukunya mengatakan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan.

Dalam bukunya coplin mengatakan:

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” (Azizah, 1992, p. 365).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengidentifikasi ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama, kondisi politik dalam negeri, Kedua, kemampuan ekonomi dan militer, ketiga, pada konteks internasional yang dimana hal ini terkait posisi negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Dalam pertimbangan yang pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi para aktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan atau disebut sebagai *Policy Influencers* diantaranya yaitu partai politik, birokrat, pemangku kepentingan dan media massa.

Coplin juga menjelaskan dalam pembuatan kebijakan luar negeri setidaknya menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran atas kepentingan yang dimiliki kelompok, birokrat sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan pada level politik dalam negeri, dan partai politik. Selain itu coplin mengatakan bahwa kelompok kepentingan memiliki peran besar dalam sistem politik yang terbuka di suatu negara. Namun, hal tersebut bukan menjadi asumsi bahwa kelompok tersebut selalu menjadi penentu kebijakan yang utama dari suatu desan kebijakan ekonomi negara. Sebaliknya, dengan menggunakan sistem politik yang terbuka tentu turut serta memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang cukup terbatas dalam

memanfaatkan pengaruhnya di suatu negara. Begitupun hal yang sama juga dapat terlihat dari peran partai politik di negara yang memiliki sistem politik terbuka.

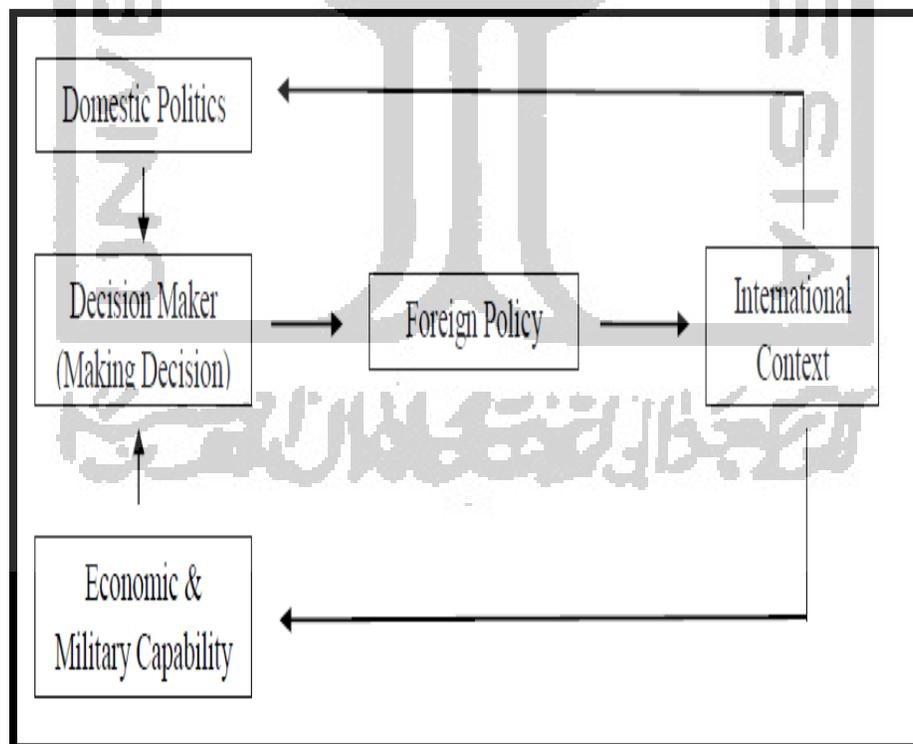
Pada aspek yang kedua yaitu kekuatan ekonomi dan militer. Untuk kekuatan ekonomi sendiri memiliki beberapa aspek diantaranya adalah sejarah perkembangan kondisi ekonomi negara, kapasitas produksi nasional dan ketergantungan negara terhadap perdagangan internasional. Sejarah perkembangan ekonomi memiliki peran yang besar untuk bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam hal ini ekonomi selain itu juga dapat mengukur kapasitas produksi barang ekspor. Lalu untuk aspek kekuatan militer, diukur melalui peran kapasitas dalam penggunaan kekuatan militer dan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup untuk membentuk arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Pada aspek yang terakhir berikutnya adalah melalui dimensi yang berbeda dari aspek pertimbangan pertama dan kedua. Dinamika dalam negeri yang pada dasarnya diukur melalui politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer maka untuk konteks internasional memiliki pertimbangan yang berbeda. Pertimbangannya merupakan dimensi luar negeri yang memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri itu sendiri. Dengan demikian sifat lingkup internasional yang disertai dengan hubungan antar negara terhadap situasi-situasi pada sistem internasional yang menentukan bagaimana nantinya negara akan mengambil sikap. Coplin sendiri dalam bukunya menjelaskan bahwa ada tiga aspek berikutnya yang terdiri dari aspek ekonomi, politis, dan geografis. Kemudian letak geografis yang berhubungan dengan perdagangan antar negara dan keanggotaan dengan organisasi antar pemerintah.

Selain itu, aspek ekonomi juga memiliki peran penting dalam lingkup internasional. Pergerakan arus barang dan jasa ataupun modal membuat pola ketergantungan suatu negara

dengan negara lainnya dan dalam segi politis digambarkan dengan hubungan politik terhadap suatu negara dengan negara lain memiliki peran signifikan dalam politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini Coplin menyebutkan kerjasama keamanan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anggota atau non-anggota aliansi dalam merumuskan suatu kebijakan politik luar negeri. Semua pertimbangan tersebut tentu berperan atas saling terhubungnya setiap pertimbangan tersebut terhadap para penentu kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut dikarenakan dalam lingkup politik dalam negeri, kedua kekuatan yaitu ekonomi dan militer mempunyai peran yang kuat dan sama dalam membentuk kebijakan politik luar negeri suatu negara. Artinya, ketiga pertimbangan tersebut memberikan kesinambungan dalam hal pengaruh satu sama lain.

Dibawah ini merupakan gambaran pola mengenai bagaimana proses dalam pengambilan kebijakan suatu negara yang dipaparkan oleh Coplin dalam bukunya, yaitu:



Gambar 1: Proses Pengambilan Kebijakan (Coplin, 1992).

Dengan demikian, penulis melihat bahwa teori ini sangat cocok digunakan sebagai dasar analisis dari penelitian ini. Dalam teori ini memberikan gambaran bagaimana suatu negara dalam berproses dan menentukan suatu pengambilan keputusan dalam kebijakan melalui indikator-indikator yang dijelaskan di dalam teori tersebut. Thailand sebagai aktor negara mengeluarkan kebijakan mengenai analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sebab dampak yang diterima Thailand akibat kabut asap lintas batas negara yang berasal dari Indonesia sangat signifikan. Penulis mengklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan teori ini yaitu dengan melihat melalui tiga indikator dalam teori *rational choice*, yaitu:

a. Kondisi politik dalam negeri

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi bagaimana keputusan Thailand untuk mengeluarkan kebijakan mengenai analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Adapun aspek politik dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling memiliki peran dalam menentukan kebijakan politik dalam negeri. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mampu mendorong dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah Thailand.

b. Kondisi ekonomi dan militer

Kondisi ekonomi dan militer Thailand mempengaruhi keputusan Thailand terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Penulis perlu mencari

tahu bagaimana kondisi ekonomi dan militer Thailand. Maka dari itu, membutuhkan kondisi ekonomi yang kuat bagi Thailand. Sedangkan dalam segi militer, Thailand tidak terlalu membutuhkan alutista yang kuat. Hal tersebut dikarenakan permasalahan kabut asap lintas batas negara bukan suatu permasalahan yang berdampak pada kekuatan militer. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan nanti mampu menciptakan negosiasi untuk menangani kondisi ekonomi Thailand.

c. Konteks internasional

Dalam aspek ini mencoba untuk memberikan pertimbangan yang akan mendorong bagaimana Thailand akan mengeluarkan kebijakan atau keputusan dalam penelitian ini. Pada tahun 2015, kondisi asap yang sampai melewati lintas batas negara cukup parah. Namun, hal tersebut memberikan dampak positif maupun negatif. Dalam hal positif, Thailand dapat memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Sedangkan, dampak negatif yang dialami yaitu mengalami beberapa kerugian. Solusi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa teori *rational choice* sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Bagaimana teori ini akan melihat permasalahan kabut asap lintas batas negara untuk menganalisis terkait *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Sebab permasalahan ini sangat berpengaruh bagi Thailand baik kondisi internal maupun eksternal dalam pembuatan kebijakan luar negerinya mengenai dampak yang diterimanya akibat kabut asap lintas batas negara yang berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis untuk menganalisis dan menjawab penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang secara garis besar data dalam penelitiannya berdasarkan data interview, observasi, dan dokumen atau teks yang kemudian dipelajari dan di narasikan (Parwito, 2007, p. 96). Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan. Di mana sumber dari studi kepustakaan dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal, buku-buku, berita, serta data-data yang data dijakian referensi yang valid.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam peneltian, subjek penelitian merupakan salah satu bagian yang tidak dapat didapat dipisahkan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitian ini memilikisubjek penelitian yaitu Thailand. Sehingga dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara spesifik dari analisa yang dilakukan terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu pada data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Data sekunder ini dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, berita, internet dan dokumen lainnya. Sehingga data-data tersebut akan dikumpulkan penulis untuk dilakukan

studi kepustakaan agar data-data tersebut dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan data-data yang ada.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis dalam proses penelitian, sudah dijelaskan di atas bahwa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, tahapan-tahapan proses penelitiannya yaitu: *Pertama*, melakukan studi kepustakaan yang akan digunakan untuk mencari referensi atau sumber dalam penelitian ini. *Kedua*, dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel, berita, laporan resmi, dan sumber lainnya yang dirasa valid untuk digunakan. Sehingga dengan data tersebut akan dijadikan penulis sebagai bahan pendukung dalam penelitian, sekaligus bertujuan untuk memperkuat bukti dari penelitian ini bahwa data yang digunakan merupakan data yang valid. Kemudian setelah itu, data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisa oleh penulis secara mendalam untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB II

KONDISI POLITIK DOMESTIK THAILAND

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Ketiga faktor determinan pertimbangan di atas telah memiliki peran yang saling berhubungan dalam mempengaruhi setiap pertimbangan para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Di mana pada konteks dalam negeri yaitu terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Sehingga ketiga pertimbangan tersebut tidak berdiri secara terpisah karena saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Adanya deforestasi dan kebakaran di Indonesia menimbulkan terjadi permasalahan secara signifikan. Sebab deforestasi dan kebakaran hutan tersebut secara langsung kabut asap lintas batas negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, berhubungan dengan kebakaran hutan di Indonesia yang telah menjadi isu lingkungan, maka pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran udara lintas batas negara. Di mana dalam segi hukum internasional, tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain (Wallace, 2002, p. 175). Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran udaralintas batas negara yang terjadi di Asia tenggara. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary haze pollution*

(AATHP). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara berkelanjutan.

Deforestasi dan kebakaran hutan telah menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Kabut asap ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya deforestasi dan kebakaran hutan yang sangat parah di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan menimbulkan kerugian yang signifikan pada beberapa sektor, yaitu sektor kesehatan, perekonomian, dan pariwisata. Bahkan dalam hal ini, kerugian tersebut juga terjadi di beberapa negara Asia Tenggara yang terkena dampak dari kabut asap lintas batas negara. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak akibat kabut asap dari Indonesia.

Pemerintah Thailand telah melakukan penanggulangan dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Thailand bersama negara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun regional dalam hal ini melakukan kerja sama yang diharapkan dapat menanggulangi dampak dari kabut asap yang terjadi (Suryani, 2012, p. 67). Sehingga kerja sama tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Selain itu, secara otomatis hubungan kerja sama yang dilakukan dapat menjaga dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara Asia Tenggara secara umum. Apalagi dalam permasalahan kebakaran hutan ini, Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sehingga dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. Yang lebih lanjutnya akan penulis analisis menggunakan empat variabel dalam *Rational Choice Theory*, yaitu:

2.1 Birokrasi

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, 1992, pp. 81-82). Dengan demikian maka dari itu dalam merespon kebakaran hutan yang berdampak di Thailand dan bertanggung jawab oleh birokrat adalah kementerian.

➤ **Kementerian Luar Negeri**

Desakan pemerintah Thailand terhadap Indonesia untuk menyelesaikan kebakaran hutan berasal dari kementerian luar negeri. Dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai pihak yang mendapatkan mandat untuk mengatur hubungan luar negeri. Menurut peraturan tersebut kementerian luar negeri memiliki sepuluh fungsi, yaitu:

- a. Mewakili Pemerintah Kerajaan Thailand dalam konferensi dan negosiasi internasional untuk melindungi, memelihara, dan mempromosikan kepentingan nasional Thailand dalam forum bilateral dan multilateral, dan untuk berpartisipasi dalam pembentukan prinsip dan norma internasional.
- b. Mengawasi kebijakan luar negeri Thailand dan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lain tentang kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan urusan luar negeri dan hukum internasional.
- c. Melindungi dan mempromosikan hak dan kepentingan warga negara Thailand yang tinggal atau bepergian ke luar negeri, serta menyediakan layanan konsuler.

- d. Mempromosikan dan memfasilitasi transfer pengetahuan, pengetahuan, dan praktik terbaik dari luar negeri serta norma-norma internasional dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial Thailand.
- e. Tingkatkan kepercayaan internasional dalam, dan citra positif, Thailand.
- f. Melakukan fungsi protokol yang sejalan dengan praktik internasional untuk mendukung tugas-tugas di luar negeri.
- g. Mempromosikan dan mengimplementasikan kerja sama pembangunan Thailand di tingkat bilateral dan multilateral.
- h. Membangun dan menyebarkan pengetahuan tentang urusan luar negeri untuk mempromosikan pemahaman semua sektor masyarakat Thailand dan publik Thailand.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan luar negeri dengan semua sektor terkait di Thailand.
- j. Meningkatkan kemampuan dan efektivitas organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri diurus oleh Kemenlu (Thailand). Dalam konteks kebakaran hutan dan deforestasi yang disebabkan oleh pembakaran hutan ilegal di Indonesia yang mengakibatkan kabut asao di Thailand, maka kemenlu Thailand berperan penting karena kaitan masalah ini adalah lintas negara.

Dalam upaya mengatasi kebakaran hutan kementrian luar negeri Thailand memanggil Duta Besar Indonesia untuk Thailand untuk menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia, mengingat dampaknya terkena di Thailand. Dalam pertemuannya dikutip oleh wartawan BBC Indonesia Jerome Wirawan mengatakan bahwa

(Wirawan, 2015): “Mereka menyampaikan concern mengenai dampak asap yang sudah sampai di beberapa provinsi di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia”.

Masih dalam sumber yang sama BBC Indonesia melaporkan Sehari sebelumnya, dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-ocha, memerintahkan menteri luar negerinya untuk menghubungi Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Luthfi Rauf, untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Tahun ini adalah kondisi yang terburuk. Sumber masalahnya bukan berasal dari kami, namun berdampak pada kami dan sahabat-sahabat kami di wilayah ini” kata Jenderal Prayut Chan-ocha sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Soal keluhan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan wilayah ASEAN memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani kabut asap. Sudah ada mekanismenya sendiri di ASEAN melalui ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (Wirawan, 2015).

Artinya bahwa kementerian luar negeri Thailand telah melakukan berbagai upaya sebagai diplomasi luar negeri untuk mencoba mengatasi masalah kebakaran hutan di Indonesia dengan pendekatan structural birokrasi sebagai departemen yang tentunya diatur UU Thailand sebagai agen yang mengurus hal-hal yang berkaitan eksternal dalam mengejar kepentingan negara Thailand.

2.2 Partai Politik

Pada komponen kedua adalah partai politik, di mana William D. Coplin mengatakan bahwa partai politik merupakan *partisan influencer*. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat dipahami bahwa partai politik melakukan keberpihakan terhadap aktor politik, yang mana dalam hal ini yaitu eksekutif. Selain itu, berdasarkan fungsinya, partai politik menyalurkan tuntutan-

tuntunan masyarakat kepada para pengambil kebijakan sehingga para pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, 1992, pp. 84-85). Sebab dalam konteks ini perdana menteri atau pejabat terkait merupakan kader partai. Di mana parta politik menjadi kendaraan politik dalam sistem demokrasi. Sehingga perdana menteri berasal dari partai politik merupakan sebagai perpanjang tangan dari partai politik. Perdana menteri menggunakan suaranya dengan membawa namapartai yang telah menjadi kendaraan politiknya.



a) Perdana Menteri

Dalam konteks ini perdana menteri Thailand yaitu Prayut Chan-o-cha On merupakan elit partai Palang Pracharath Party (*People's State Power Party*). Ia mengatakan bahwa menerima jaminan dari perwakilan pemerintah Indonesia terhadap pihaknya dan berjanji segera menyelesaikan masalah tentang polusi udara yang timbul dari kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. *The Nation* melaporkan bahwa meskipun PM tidak akan mengungkapkan nama wakilnya, dia mengatakan itu adalah wakil presiden pemerintah dan Indonesia hanya memiliki satu wakil presiden, yaitu Jusuf Kalla. Prayut bertemu dengan Kalla saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York. PM mengatakan bahwa memahami pihak berwenang Indonesia dalam melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi kebakaran hutan. Selain itu, penduduk di selatan Thailand yang mana banyak di daerah tersebut telah dilanda kabut asap harus menjaga diri mereka aman dari polusi udara.

Menurut media (*The Thaiger & The Nation*, 2019), PM Prayut Chan-o-cha mengatakan bahwa pemerintahnya selalu khawatir tentang polusi udara, terutama PM2.5 atau partikel debu mikroskopis yang disebabkan oleh kabut asap dari Indonesia, kemacetan lalu lintas, pembakaran pertanian limbah, emisi pabrik dan debu dari lokasi konstruksi.

“PM2.5 is dangerous, especially for children, babies, pregnant women and elders, whose immunity is too fragile to tackle the microscopic dust.”

“People should be particularly careful during December as there are no winds or rain to blow away the dust.”

Dia juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik, mengatakan perlu memahami semua masalah terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa Kabinet menyetujui proposal minggu lalu untuk mengatasi krisis polusi di empat tingkat.

“We have explained them to all provinces and have asked for coordinated cooperation”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perhatian terhadap dampak negatif kabut asap menjadi *concern* perdana menteri Thailand. Menjadi perhatian perhatian kepala negara karena dampak dari kebakaran hutan mempengaruhi kesehatan masyarakat, mempengaruhi perekonomian hingga citra Thailand. Untuk itulah pernyataan perdanan menteri Thailand dapat dikatakan mewakili suara Thailand. Patutnya suara ini dapat dipertimbangkan Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah.

b) Parlemen

Upaya mengatasi kabut asap tidak hanya perdana menteri Thailand, upaya tersebut juga dilakukan oleh parlemen Thailand. Parlemen Thailand tentu pastinya dalam system demokrasi di isi oleh partai politik dalam kata lain anggota parlemen Thailand juga merupakan kader partai politik.

Sattra Sripan, anggota Parlemen dari Partai Palang Pracharat untuk Songkhla, bertemu dengan konsulat jenderal Indonesia Fachry Sulaiman untuk menyerahkan sebuah petisi yang menyerukan negara tetangga (Indonesia) untuk menangani dan mencegah kabut asap dari kebakaran hutan, telah menyelubungi Songkhla dan provinsi perbatasan selatan.

“People have to wear face masks and refrain from outdoor activities, while some have already developed respiratory problems,” Konsul menjawab dengan mengatakan bahwa Indonesia melakukan segala yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan bahkan

menangkap mereka yang berada di belakangnya, karena masyarakat Indonesia juga menderita kabut asap. Dia juga mencatat bahwa dalam banyak kasus, kebakaran hutan disebabkan secara alami dari pembakaran dan panas termal bawah tanah.

2.3 Kelompok Yang Berkepentingan

Variabel ketiga ini adalah “*interest influencers*” yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, 1992, p. 87). Dalam hal ini merugi adalah perusahaan maskapai Thai Airways yang menunda penerbangan disebabkan oleh kabut asap.

➤ **Thai Airways**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kebakaran hutan di Indonesia berdampak terhadap kabut asap yang mengakibatkan penerbangan terganggu. Kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah besar di Thailand yang membuat jadwal penerbangan tertunda. Penyebaran kabut asap yang berasal dari Indonesia membuat jadwal penerbangan bandara Internasional Chiang Mai terganggu.

Kabut asap dan polusi udara yang berasal dari Indonesia menyelimuti negara Thailand dan membuat level udara tidak sehat. Tercatat pada umumnya limit aman partikel debu hanya 120 mikrogram per kubik udara. Namun dengan adanya kiriman kabut asap dari Indonesia membuat partikel debu mencapai 202 mikrogram per kubik udara.

Penerbangan pesawat Thai Airways Internasional dengan nomor maskapai TG102 yang sesuai jadwal berangkat dari Bangkok ke Chiang Mai namun tidak bisa mendarat di bandara Chiang Mai dikarenakan kabut asap yang tebal hingga pesawat Thai Airways terpaksa kembali ke Bangkok dan menunggu sampai sore hari untuk mencoba kembali terbang ke Chiang Mai.

Tidak hanya pesawat Thai Airways yang menunda penerbangan namun ada maskapai lain yang menunda penerbangan ke Chiang Mai seperti Nok Air dan Bangkok Air Airways yang membuat jadwal ulang penerbangan menuju Chiang Mai (Primus, 2014).

Dengan demikian, adanya kabut asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Di mana dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor perusahaan penerbangan Thai Airways Internasional. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara memiliki dampak yang signifikan terhadap Thailand yang membuat jadwal penerbangan Thai Airways terganggu.

➤ **Greenpeace**

Polusi udara menjadi sorotan di dunia sebab salah satu kota wisata di Bangkok yang sangat populer dan banyak wisatawan yang berkunjung ke Bangkok. Akan tetapi, banyak penduduk mengeluh tentang kabut asap yang terjadi di Thailand. Maka dari itu Greenpeace mengatakan Bangkok menderita polusi udara terburuk. Departemen pengendalian pencemaran menjelaskan tingkat udara di Thailand mencapai partikel kecil lebih dari 2,5 mikrometer atau partikel debu PM2.5 yang dimana udara yang terjadi di Thailand termasuk yang paling berbahaya dan meminta anak-anak untuk tetap tinggal di dalam rumah (Lefevre, 2018).

Aktivis Greenpeace memberikan pesan kepada perwakilan pemerintah di Bangkok yang menyimpulkan bahwa Thailand sedang dalam bahaya polusi udara. Bangkok tidak bisa terus menghirup udara yang sangat berbahaya kepada kehidupan masyarakat dan memengaruhi produktivitas ekonomi Thailand. Maka dari itu kelompok lingkungan hidup Greenpeace meminta

kepada Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha untuk mengatasi krisis polusi udara di Bangkok (Lefevre, 2018).

Dengan demikian dengan adanya kabut asap yang terjadi di Thailand berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Dimana dampak tersebut berpengaruh kepada sektor kesehatan dan ekonomi Thailand dan melalui aktivis Greenpeace menyuarakan kepada Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi polusi udara yang buruk terjadi di Thailand.

2.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait dampak deforestasi atau kebakaran hutan di Indonesia terhadap kerugian-kerugian yang dialami Thailand akan di data sebagai berikut:

No	Nama Media	Isi	Situs
1	The Thaiger	Thai PM says Indonesian government promises to control air pollution from forest fires	https://thethaiger.com/news/air-pollution/thai-pm-says-indonesian-government-promises-to-control-air-pollution-from-forest-fires
2	Thainews	Forest fire causes smog in Phayao	http://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG190331165806797
3	The Star	Thai popular resort island Phuket shrouded in haze caused by Indonesian fires	https://www.thestar.com.my/news/regional/2019/09/23/thai-popular-resort-island-phuket-shrouded-in-haze-caused-by-indonesian-fires
4	Thaivisa	Battle against forest fires continues as pollution levels rise	https://news.thaivisa.com/article/33761/battle-against-forest-fires-continues-as-pollution-levels-rise

5	Bangkok Post	Disaster zones declared over forest fire	https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1722679/disaster-zones-declared-over-forest-firedukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/
6	The Nation Thailand	Millions of rai of forested land destroyed by wildfires	https://www.nationthailand.com/national/30367627

Tabel 1: Media Massa Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif se framing positif sesuai dengan fakta objektif, dan dengan sentuhan framing seolah Thailand mendapat kerusakan dan kerugian yang cukup besar dari dampak deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan objektif yang juga objektifitas ini sesuai menggambarkan kepentingan Thailand. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.



جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB III

KONDISI EKONOMI, KEAMANAN, DAN KONTEKS INTERNASIONAL

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor determinan kedua yaitu kondisi ekonomi dan keamanan. Dalam konteks ini adalah kondisi ekonomi dan keamanan yang mendorong Thailand meraih kepentingannya terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka terdapat dua (2) sub-bab dalam pembahasan ini, *Pertama*, ekonomi, dalam hal ini melihat aspek kondisi ekonomi Thailand terdampak dari kebakaran hutan dan deforestasi oleh Indonesia. *Kedua*, keamanan dan militer, pada hal ini meninjau aspek militer dan keamanan yang juga mendorong munculnya keinginan Thailand untuk segera meminta Indonesia menyelesaikan masalahnya (deforestasi) karena dampak dari masalah tersebut hingga ke Thailand.

3.1 Kondisi Ekonomi Thailand

Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Di mana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri negara itu. Oleh karena itu, ekonomi Phuket tidak hanya dari penambangan timah tetapi melalui perkebunan pohon karet yang menjadikan Thailand produsen karet terbesar di dunia dan pariwisata. Ekonomi Phuket bertumpu pada dua pilar: perkebunan pohon karet menjadikan Thailand produsen karet terbesar di dunia dan pariwisata (Pardomuan, 2014).

Sejak 1980-an, pantai berpasir di pantai barat pulau telah dikembangkan sebagai tujuan wisata, dengan Patong, Karon, dan Kata menjadi yang paling populer. Pasca tsunami 2004,

semua bangunan dan objek wisata yang rusak telah dipulihkan. Pembangunan Phuket sedang dikembangkan secara intensif, dengan banyak hotel, apartemen, dan rumah baru sedang dibangun. Phuket memiliki 60.000 kamar hotel untuk 9,1 juta pengunjung tahunannya (Sarosi, 2017).

Laporan dari media DW menyebutkan bahwa kabut asap dari Indonesia menyebar melanda hingga Thailand yang berdampak pada sektor pariwisata penting negara ini. Provinsi-provinsi di semenanjung, Narathiwat, Phuket dan Phangnga terkena dampak yang cukup parah. Akibatnya, industri pariwisata mulai merasakan dampak dari kabut berkepanjangan karena Phuket dan Surat Thani memiliki pantai tropis yang populer di kalangan wisatawan (Domínguez, 2015).

Selain itu, industri pariwisata mulai merasakan dampak dari kabut berkepanjangan karena Phuket dan Surat Thani memiliki pantai tropis yang masih asli yang populer di kalangan wisatawan. Di mana memberikan keterangan ke DW (Domínguez, 2015) yaitu:

"With the Indonesian haze conditions much more protracted this year than normal, concerns are escalating that the impact of the haze could extend for at least some more weeks,"
Rajiv Biswas, Asia-Pacific Chief Economist at global analytics firm IHS,

Keterangan lebih lanjutnya yaitu:

"December is a crucial peak season for the Thai tourism industry, and if the haze continues during November, it could affect tourism bookings as tourists try to avoid the haze-affected tourism destinations in Southeast Asia," (Domínguez, 2015).

Pantai Patong adalah sebuah pantai di pantai barat Phuket. Ini adalah resor wisata utama di Phuket dan berisi pusat kehidupan malam Phuket dan belanja murah di pulau itu. Pantai menjadi populer di kalangan wisatawan barat, terutama orang Eropa, pada akhir 1980-an. Banyak hotel besar dan jaringan hotel berlokasi di Patong. Pada tahun 2017, Phuket menerima sekitar 10 juta pengunjung, kebanyakan dari mereka asing, dengan Cina sebagai kontributor utama. Turis menghasilkan sekitar 385 miliar baht dalam pendapatan, hampir 14 persen dari 2,77 triliun baht yang diterima oleh negara secara keseluruhan (Suchat, 2018).

➤ **Masyarakat (Sektor Kesehatan)**

Seperti disebutkan sebelumnya, kebakaran hutan di Indonesia berdampak terhadap polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu. Kebakaran hutan Indonesia menjadi masalah besar di Thailand yang membuat banyak orang sakit, membahayakan lingkungan, dan juga mempengaruhi industri pariwisata (Ping, 2011). Penyebaran polusi udara berbahaya bagi kesehatan manusia karena telah diungkapkan oleh berbagai penelitian terkait dengan berbagai masalah pernapasan, penyakit jantung, dan stroke. Sebagai contoh, WHO melaporkan bahwa polusi udara yang berpotensi menyebabkan timbulnya penyakit hingga resiko kematian dengan rincian presentase 40,0% penyakit jantung iskemik, 40,0% stroke, 11,0% COPD, 6,0% kanker paru-paru, 3,0% stroke (WHO, 2012).

Selain itu, menurut Rayanakorn dampak negatif dari kabut asap adalah meningkatnya gejala saluran pernapasan. Tingkat polusi udara yang tinggi dapat membahayakan kesehatan kita dan juga dapat membunuh orang, terutama ketika gas reaktif dilepaskan ke atmosfer dan orang-orang yang rentan terpapar pada mereka. Asap dari pembakaran terbuka berdampak negatif pada kualitas udara dan kesehatan manusia (Rayanakorn, 2010). Tingkat kejadian penyakit pernapasan dan rinitis alergi telah meningkat beberapa kali dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu.

Statistik kesehatan juga menunjukkan bahwa penyakit pernapasan menempati urutan kelima dari sepuluh penyebab kematian utama di Thailand. Sehingga mengenai situasi masalah kualitas udara di dalam dan di luar rumah, indikator penting dari kesehatan dan kualitas udara adalah penyakit pernapasan.

Dengan demikian, adanya kabut asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Di mana dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor ekonomi, pariwisata dan kesehatan. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia maupun negara Asia Tenggara. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

3.2 Keamanan: Kemampuan Militer Thailand

Padahal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 125). Pada sub-bab ini dibahas mengenai aspek kondisi keamanan Thailand yang menjadikan negara tersebut tidak gentar dalam mengkampanyekan ke publik tentang dampak negative deforestasi Indonesia terhadap khususnya negara Thailand

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 1992, pp. 127-130).

3.2.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya (Coplin, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, 1992, p. 124).

Thailand merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Alokasi Pengeluaran Pertahanan Thailand pada tahun 2018 mencapai 6420 USD Million. Pada 2015, Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand memiliki 357.000 tugas aktif dan 375.349 personel cadangan, mewakili 1 persen populasi 70 juta penduduk Thailand. Persentase ini lebih tinggi dari Amerika, tetapi lebih rendah dari Vietnam di dekatnya. Militer Thailand memiliki lebih dari 1.750 Perwira, jumlah yang membengkak untuk militer dengan ukuran sebesar itu (Cole John, 2015). Menurut seorang pengamat, setiap jenderal Thailand memiliki tiga tujuan: untuk menyelaraskan dirinya dengan politisi dari partai politik; untuk memastikan bahwa dia menerima posisi politik strategis; dan untuk memperkaya dirinya sendiri dan berbagi hasil dengan bawahannya sehingga memastikan kesetiaan mereka (Rappa, 2018).

Berikut merupakan tabel alokasi pengeluaran pertahanan Thailand, yaitu:

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1	2009	5552 USD Million
2	2010	5138 USD Million
3	2011	5292 USD Million
4	2012	5216 USD Million
5	2013	5422 USD Million
6	2014	5462 USD Million

7	2015	5806 USD Million
8	2016	6131 USD Million
9	2017	6306 USD Million
1. 10	2018	6420 USD Million

Tabel 1: Alokasi Pengeluaran Pertahanan Thailand (Sumber: Diolah oleh penulis).

Dari data-data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa kapasitas penggunaan militer dapat dinilai kuat dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sikap perlengkapan militernya (Coplin, 1992, p. 137). Jika dilihat militer Thailand dapat dikatakan kuat di Asia Tenggara atau dalam arti yang luas seimbang dengan kekuatan militer Indonesia. Artinya bahwa dalam konteks isu yang dibahas penulis maka secara kalkulasi militer sengketa kabut asap antara Indonesia dan Thailand akan sangat merugikan kedua negara jika sampai meruncing ke konflik langsung kedua negara.

Inilah yang menjadi dasar bahwa kedua negara sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut secara diplomatis (non-konflik). Disatu sisi alasan diatas juga menekankan bahwa salah satu pihak terlebih khususnya Indonesia mestinya mempertimbangkan aspirasi dari thailan untuk segera menyelesaikan kabut asap. Mengingat asal mula perkara ini dimulai dari Indonesia, sehingga jika tidak hati-hati dan dampak paling buruk apabila terjadi kondisi yang memanas di kedua negara maka yang akan rugi kedua negara karena secara kapabilitas kekuatan tempur sama-sama seimbang.

3.2.2 Tingkat Ketergantungan Pada Sumber-sumber Luar Negeri

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 1992, p. 143).

Thailand merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas, serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Thailand merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Dilaporkan oleh agen Interfax-Ukraina bahwa Angkatan Darat Kerajaan Thailand telah menerima setidaknya sekumpulan lima tank tempur utama modern Oplot-T yang dipasok oleh *the Morozov Design Bureau* dan dibangun di Pabrik Malyshev Ukrainian di Kharkiv (Willett, 2018). Perlengkapan merupakan era Soviet, konfigurasi senjata standar akan mencakup senapan smoothbore KBA-3 125mm, senapan mesin koaksial KT-7.62 (PKT) dan senapan mesin anti-pesawat KT-12.7. Jenis ammunition avialalbe termasuk fragmentasi peledak tinggi (HE-FRAG), sabot pembuangan-distabilkan siot sabot (APFSDS) yang dapat menembus baju besi (rompi), peledak anti tank (HEAT) dan peledak gun (GM) yang tinggi. Persyaratan Angkatan Darat Thailand adalah setidaknya untuk 49 MBs Oplot-T (Willett, 2018).

Jenderal Chalermchai juga mengatakan bahwa Thailand akan membeli 34 mobil lapis baja VN-1 dari Cina dengan nilai pesanan \$ 68 juta (Bt 2,3 miliar). Dia mengatakan bahwa keputusan pembelian Thailand bukan masalah aliansi, tetapi bahwa tank dan kendaraan merupakan pilihan yang lebih hemat biaya bagi negara (Willett, 2018). Sedangkan industri di

Thailand juga terlibat dalam proses modernisasi. Panus Assembly, sebuah perusahaan otomotif utama yang berbasis di provinsi Panusnikom telah membangun kembali dan memodernisasi Cadillac Gage V-150 kendaraan lapis baja 4 × 4 (LAV) untuk Royal Thai Navy (RTN). Kendaraan ini awalnya dirancang sebagai mobil lapis baja amfibi. Kendaraan 16 ton, yang sebelumnya rusak selama operasi pemberontak, telah mengalami banyak peningkatan. Ini termasuk armor yang lebih tebal di bagian bawah yang telah ditingkatkan menjadi 16mm, dan armor 12mm di sisi dan permukaan atas. Ada juga mesin 8,9 liter baru Cummins ISL Euro 3 350 hp memberikan kecepatan tertinggi sekitar 110 km / jam. Transmisi otomatis telah ditingkatkan menjadi Allison 4500 dengan enam gigi (Willett, 2018). Kendaraan telah dirancang ulang sebagai HMV-150, dan perusahaan berharap bahwa RTN akan cukup terkesan dengan peningkatan yang dibuatnya sehingga ingin 24 V-150 lainnya dimodifikasi secara serupa.

Angkatan Darat Thailand juga ingin meningkatkan serangan dan armada helikopter utilitasnya. Meskipun tidak ada keputusan yang diumumkan mengenai helikopter serang, Bell Helicopter sangat tertarik untuk menawarkan AH-1Z Cobra yang saat ini menggantikan pendahulunya, AH-1W, di Korps Marinir Amerika Serikat (USMC). RTA juga mengoperasikan sejumlah kecil Huey Cobras AH-1F. Namun penantang lain dikatakan termasuk jajaran luas yang mencakup semua pangkalan secara politis dan termasuk Leonardos AW129 Mangusta, Helikopter Rusia Mil Mi-28, CAIC Z-10 Cina, dan Boeing AH-64F Apache (Willett, 2018).

Armada utilitas sangat lebar dan beragam. Setelah mengandalkan Bell UH-60s dan Bell 212 / 412s selama bertahun-tahun, namun demikian tampaknya ada peluang di sini untuk jenis lain seperti Leonardos AW139, di mana Angkatan Darat sekarang mengoperasikan 10 helikopter dalam peran VIP. Helikopter modern lainnya sedang dipertimbangkan juga termasuk Sikorsky UH-60M untuk pergi dengan armada yang ada UH-60L / Ms (Willett, 2018).

Oleh karena itu, dalam argumentasinya Coplin juga menjelaskan bahwa selain menaksir kemampuan militer perlunya menyadari sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan militernya makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar dalam menggunakan kekuatan (Coplin, 1992, pp. 90-95).

Telah disebutkan di atas bahwa kekuatan militer Indonesia dan Thailand seimbang dalam artian ketergantungan terhadap luar negeri juga merupakan andalan bagi kekuatan militer pertahanan kedua negara. Kemudian mengingat ketergantungan terhadap luar negeri secara langsung mempengaruhi pengeluaran dalam negeri untuk membiayai pasokan perlengkapan militer dengan kata lain anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand mencegah terjadinya konflik secara langsung karena aka rugi secara materil. pada kondisinya yang menjadi dasar bahwa kedua negara sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut secara berdialog (non-konflik). Disatu sisi alasan diatas juga menekankan bahwa salah satu pihak terlebih khususnya Indonesia harusnya mempertimbangkan aspirasi dari thailan untuk segera menyelesaikan kabut asap. Mengingat asal mula perkara ini dimulai dari Indonesia, sehingga jika tidak hati-hati dan dampak paling buruk apabila terjadi kondisi yang memanas di kedua negara maka yang akan rugi kedua negara karena secara kapabilitas kekuatan tempur sama-sama seimbang.

3.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer

Indikator ketiga seperti yang dijelaskan oleh William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan militer tersebut berfungsi (Coplin, 1992, p. 128). Dalam penelitian ini Thailand merupakan negara yang besar di

ASEAN. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Thailand juga merupakan multi-agama dan multi-etnis (Kuwinpant, 2002).

Pada 1 Januari 2007, tiga orang dipastikan tewas dan lebih dari 38 lainnya cedera. Satu bom meledak di dalam bioskop, tetapi tidak dilaporkan hingga hari berikutnya karena kekhawatiran publisitas negatif. Pagi berikutnya, sebuah bom meledak di sebuah masjid di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara. Pihak berwenang memerintahkan semua acara malam tahun baru publik dibatalkan (Nn, Thai PM blames rivals for blasts, 2007). Polisi Chiang Mai mengklaim petugas kebersihan masjid Chiang Mai membuat bom tersebut. Seorang pria ditangkap di Bangkok karena membawa alat peledak. Namun, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman Bangkok. Perdana Menteri Surayud Chulanont menyalahkan *"old power clique"* sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas pemboman itu, merujuk pada pemerintah yang digulingkan Thaksin Shinawatra serta semua orang yang telah kehilangan kekuatan politik karena kudeta militer 2006 (Nn, Surayud qualifies remarks about bombers, 2007).

Baik partai Thai Rak Thai maupun Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan membantah terlibat. Surayud kemudian mundur dan mengakui bahwa klaimnya bahwa Thaksin-sekutu bertanggung jawab "hanyalah analisis intelijen" dan tidak didasarkan pada bukti atau informasi yang kuat (Nn, Surayud qualifies remarks about bombers, 2007). Surayud mengumumkan bahwa meskipun bom memiliki desain yang serupa dengan yang digunakan oleh para pemberontak di provinsi-provinsi selatan yang didominasi muslim di Thailand, inspeksi lebih dekat menunjukkan tidak ada kaitan dengan mengatakan *"Saya tidak berpikir mereka akan datang ke sini karena mereka bisa hilang di Bangkok"*. Polisi menangkap lebih dari selusin orang, termasuk beberapa perwira militer, karena dicurigai terlibat dalam

pemboman. Pemimpin Junta Jenderal Sonthi Boonyaratglin, dirinya seorang Muslim, mengklaim semua perwira militer tidak bersalah (Nn, Coup leaders tighten grip, 2007).

Investigasi polisi kemudian menentukan bahwa separatis selatan sebenarnya di balik pemboman. Sirkuit peledakan dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat bom itu identik dengan yang digunakan oleh pemberontak Islam. Namun, junta mengecilkan peran separatis selatan, mengklaim mereka telah disewa oleh orang-orang yang terhubung dengan kekacauan politik di Bangkok (Chitradon, 2007). Jika dilihat bahwa ancaman Thailand dapat berasal dari dalam dan luar negeri, kudeta yang menjadi realita transisi politik demokratis Thailand menjadi sebuah ironi yang dihapkan dengan kekuatan militer yang kemudian turut berpartisipasi dalam politik praktis semakin semakin menegasikan terjadinya oligarki dalam kekuasaan. Dampak dari realitas tersebut mungkin membuat masyarakat jenuh, hingga muncullnya kelompok-kelompok politik identitas yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah lewat aksi terorisme tersebut. Masalah-masalah ini yang kemudian menurut penulis dapat merongrong kestabilan domestik Thailand.

Secara teoritis William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, 1992, p. 124). Hal ini artinya menghendaki kondisi keamanan negara seperti yang digambarkan diatas, bahwa secara kekuatan militer Thailand merupakan negara salah satu negara dengan nilai kekuatan militer tertinggi di ASEAN. Dengan kata lain proses pembuatan kebijakan Thailand terhadap Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan Deforestasi dan kebakaran hutan menjadi tegas karena aspek militer mendukung pola perumusan kebijakan ini, dengan kata lain bahwa aspek militer sifatnya *defence* bahwa bukan untuk menyerang atau angkat senjata melainkan sebagai *back up* perumusan kebijakan, secara teori hal ini dimungkinkan karena

secara psikologis kebijakan yang dikeluarkan akan gertakan psikologis yang memuat pihak kedua dalam hal ini Indonesia mempertimbangkan kemauan Thailand untuk segera mengatasi permasalahan asap.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dalam tulisan ini aspek militer yang merupakan salah satu variabel teori dimengerti hanya sebagai penyempurnaan dari hirarki teori. Karena aspek militer disini tidak memberikan pengaruh signifikan dalam artian bahwa literatur-literatur yang mendukung variabel teori ini sebagai proses pengambilan keputusan tidak di temukan melainkan hanya sebatas penyempurnaan hirarki teori.

3.3 Konteks Internasional: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Sub-bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang dimana secara internasional merespon dampak dari deforestasi, dalam penulisan ini juga penulis menganalisis konten konten perjanjian tersebut.

Salah satu masalah berkelanjutan yang dialami oleh negara-negara ASEAN adalah pencemaran kabut asap lintas bata. Itu terjadi ketika pencemaran asap di satu negara, dengan melintasi perbatasan melalui udara, menyebabkan kerusakan di lingkungan negara lain. Kabut asap di ASEAN biasanya terkait dengan kebakaran hutan. Penyebab utama pencemaran kabut asap adalah kebakaran massal yang secara ilegal ditetapkan untuk menebangi hutan dan membuka jalan bagi perusahaan seperti perkebunan kelapa sawit. Karena kabut asap, kualitas

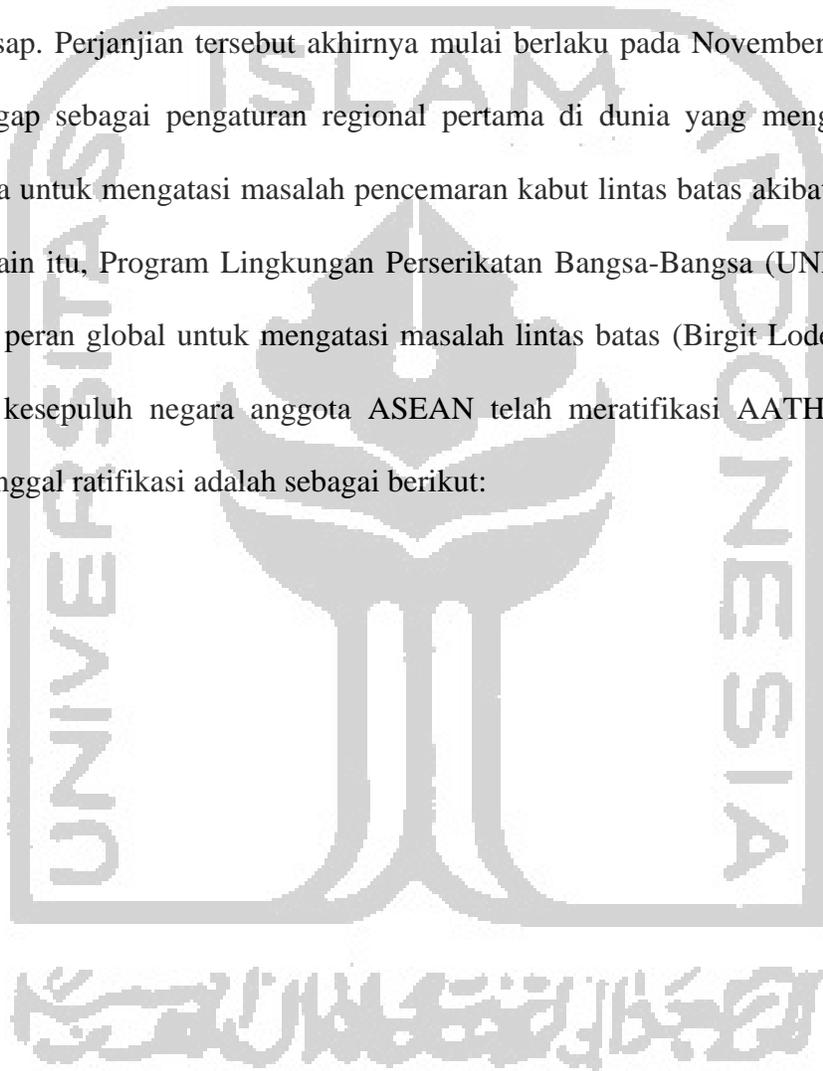
udara menjadi sangat buruk, berbahaya dan mempengaruhi kesehatan masyarakat (Othmad, 1999).

Sejak 1982, negara-negara ASEAN telah mengalami pencemaran kabut lintas batas, yang disebabkan oleh kebakaran yang sebagian besar terjadi di Indonesia (Varkkey, 2013). Iklim Indonesia dapat dikarakteristikan dengan dua musim yaitu kemarau dalam bulan April hingga September dan musim dingin (hujan) Oktober hingga Maret. Bulan-bulan musim kemarau adalah bulan-bulan di mana kebakaran di Indonesia terjadi. Kebakaran semakin memburuk dan parah selama tahun-tahun El Nino (Robert D.Field, 2004). Sejak 1997, Kalimantan dan Sumatra diidentifikasi sebagai pusat bencana kebakaran hutan di Indonesia yang dampaknya hingga ke negara-negara ASEAN.

Tahun 1997-1998 dianggap sebagai pencemaran kabut asap terparah di negara-negara ASEAN. Diperkirakan 45.000 km² kebakaran hutan dan kebakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan antara Juli - November 1997. Kebakaran hutan dan kebakaran lahan pada 1997-1998, yang melanda negara-negara ASEAN sangat parah. *United Nations Environment Programme* menyebut kebakaran besar pada tahun 1997 - 1998 sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah (Goldammer, 2001) (Heil & Goldammer, 2001). Total kerugian ekonomi telah diperkirakan adalah \$ 9,3 miliar dalam hal produksi pertanian, perusakan lahan hutan, kesehatan masyarakat, pariwisata, transportasi dan lainnya. Menyadari perlunya mengurangi polusi kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kerja sama regional dalam kabut lintas batas, ASEAN terdiri dari sepuluh negara, yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, telah mengembangkan ASEAN

Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah ditandatangani pada tahun 2002.

ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* adalah perjanjian lingkungan yang ditandatangani pada Juni 2002 antara semua anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengurangi polusi kabut asap. Perjanjian tersebut akhirnya mulai berlaku pada November 2003. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara tetangga untuk mengatasi masalah pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Selain itu, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menandainya sebagai model peran global untuk mengatasi masalah lintas batas (Birgit Lode, 2016). Pada 20 Januari 2015, kesepuluh negara anggota ASEAN telah meratifikasi AATHP. Daftar negara anggota dan tanggal ratifikasi adalah sebagai berikut:



NEGARA ANGGOTA	TANGGAL RATIFIKASI	TANGGAL RATIFIKASI / PERSETUJUAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL ASEAN
Brunei Darussalam	27 Februari 2003	23 April 2003
Kamboja	24 April 2006	9 November 2006
Indonesia	14 Oktober 2014	20 Januari 2015
Laos	19 Desember 2004	13 juli 2005
Malaysia	3 Desember 2002	18 Februari 2003
Filipina	1 Februari 2010	4 Maret 2010
Singapura	13 Januari 2003	14 Januari 2003
Thailand	10 September 2003	26 September 2003
Vietnam	24 Maret 2003	29 May 2003
Myanmar	5 Maret 2003	17 Maret 2003

Tabel 2:
Negara-negara
negara
yang
meratifikas
i ASEAN
Agreement
on
Transboun
dary Haze
Pollution
(Sumber;
<http://haze.asean.org/s>
[tatus-of-](http://haze.asean.org/s)

ratification/).

Seperti yang dapat kita lihat dari tabel di atas, Malaysia adalah negara pertama yang meratifikasi Perjanjian, dan dari sepuluh anggota ASEAN, Indonesia adalah negara terakhir di antara sepuluh negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian tersebut meskipun Indonesia adalah negara yang terutama bertanggung jawab dalam hal masalah ini. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) terdiri dari 32 Artikel yang dibagi menjadi enam

bagian. Bagian utama dan penting dalam AATHP ini adalah Bagian II yang membahas tentang pemantauan, penilaian, pencegahan dan tanggapan.

Menurut penulis, tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran kabut lintas batas negara akibat kebakaran lahan dan / atau hutan yang harus dikurangi, melalui upaya nasional bersama dan kerja sama regional dan internasional yang intensif (ASEAN, 2002). Perjanjian ini pada dasarnya menyerukan kepada pihak-pihak untuk melakukan, antara lain, *pertama*, langkah-langkah legislatif dan administratif untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan pencemaran kabut lintas batas. *Kedua*, tindakan nasional dan kolktif untuk mengintensifkan kerja sama regional dan internasional untuk mencegah. *Ketiga*, menilai dan memantau pencemaran kabut lintas batas yang timbul dari tanah dan hutan.

Dalam perjalanannya, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengalami berbagai dinamika. Di mana dinamika yang dimaksud yaitu terkait perjalanan negara-negara anggotanya dalam meratifikasi perjanjian ini. Sehingga berikut ini merupakan kelemahan dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yaitu:

3.3.1 Keterlambatan Indonesia dalam meratifikasi

Indonesia dikatakan sebagai penyebab utama kabut lintas batas di kawasan ASEAN. Setelah satu dekade sejak AATHP mulai berlaku, Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian pada 14 Oktober 2014 dan persetujuan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN pada 20 Januari 2015. Alasan di balik ratifikasi Indonesia adalah, ia akan memperkuat profil internasionalnya dan bereaksi terhadap meningkatkan perhatian internasional. Indonesia mengambil kesempatan untuk

mengakhiri masalah kabut asap yang telah menyebabkan gangguan diplomatik di hampir setiap pertemuan ASEAN tentang kebakaran hutan dan polusi kabut asap.

Tidak ada alasan penting bagi parlemen Indonesia untuk tidak meratifikasi perjanjian, dan non-ratifikasi hanya akan terus memperumit upaya diplomasi Indonesia di ASEAN. Sebelum ratifikasi AATHP oleh Indonesia, banyak yang memperkirakan bahwa masalahnya hanya akan selesai jika Indonesia meratifikasi perjanjian. Namun pada bulan September 2015 (setelah Indonesia meratifikasi AATHP) ASEAN diliputi kabut lagi. Kabut itu parah dan dianggap bisa menjadi yang terburuk.

Dengan demikian, apakah polusi asap lintas batas kemungkinan akan berubah setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut masih dipertanyakan. Namun dengan meratifikasi perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia akan mengizinkan negara untuk mencari bantuan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk membantu menekan kebakaran. Dengan demikian hal ini dapat meringankan dilema kabut asap melalui kombinasi kolaborasi teknis global dan tindakan hukum negara terhadap perusahaan-perusahaan pria.

3.3.2 Prinsip Non Intervensi

Jika dilihat dari analisis perjanjian penulis diatas, dapat di lihat bahwa dalam perjanjian tersebut memungkinkan pihak eksternal selain ASEAN dapat membantu menyelesaikan masalah kabut asao, ini sama artinya membiarkan orang asing masuk rumah sendiri. Maka dari itu hemat penulis secara prinsipil doktrin Non Intervensi yang di pegang teguh negara ASEAN sedikit banyak tercemar karena mekanisme yang dibuat sendiri oleh negara-negara ASEAN.

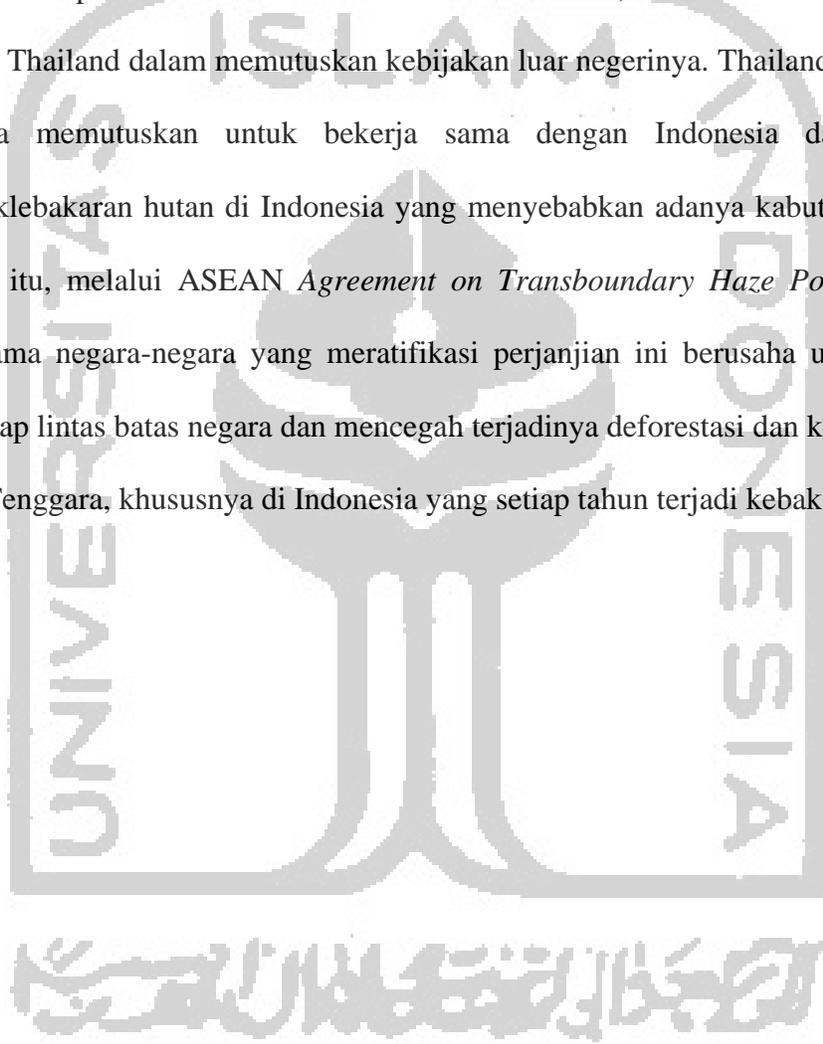
Hal ini jelas diatur dalam Pasal 12 AATHP di mana dinyatakan menyatakan bahwa salah satu pihak dalam Perjanjian ini dapat meminta bantuan dari pihak lain jika diperlukan, jika

terjadi kebakaran lahan atau hutan atau polusi asap yang disebabkan oleh kebakaran di dalam wilayahnya. bantuan hanya dapat digunakan atas permintaan dan dengan persetujuan dari pihak yang meminta atau ketika ditawarkan oleh pihak lain, bantuan harus disetujui oleh pihak penerima. Walaupun ini penting untuk menjaga pendekatan berorientasi konsensus ASEAN di depan, hal itu menciptakan kesulitan dalam menemukan solusi pragmatis untuk masalah kabut asap. Misalnya, di masa lalu, Indonesia telah menolak bantuan dari Malaysia dan Singapura mungkin karena alasan reputasi atau kedaulatan.

Kemudian yang menjadi kritik penulis adalah Meskipun Perjanjian bersifat mengikat secara hukum, ada sedikit pertanyaan tentang akuntabilitas dan mekanisme sanksi. Ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada mekanisme untuk sanksi atau penyelesaian perselisihan, dan tidak ada mekanisme pemantauan. Pasal 27 AATHP menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, itu akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi. Singkatnya, ASEAN memiliki kapasitas organisasi yang terbatas untuk benar-benar memerangi tantangan yang ditimbulkan. Artinya bahwa karena tidak ada unsur paksaan bagi pelanggar, maka harapan untuk mencegah kebakaran hutan kurang kuat.

Dengan demikian, Thailand menjadi salah satu negara yang ikut aktif dalam menangani kabut asap kiriman dari Indonesia. Thailand juga sangat intens membangun komunikasi dan membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, Thailand merupakan korban dari kabut asap lintas batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Thailand juga ikut meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Selain itu, Thailand turut membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Permasalahan kabut asap lintas batas negara ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan yang sering terjadi setiap tahun. Namun, kebakaran hutan ini menjadi kasus kebakaran hutan yang parah yaitu terjadi pada tahun 2015 (Hubbusysyuhada, 2018, p. 298). Sehingga melihat juga kondisi Thailand yang juga terkena dampak akibat kabut asap lintas batas negara yang merupakan kiriman dari Indonesia. Maka, kondisi internasional sangat mempengaruhi Thailand dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Thailand dalam kebijakan luar negerinya memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan adanya kabut asap lintas batas negara. Selain itu, melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* Thailand bersama negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini berusaha untuk mengurangi polusi kabut asap lintas batas negara dan mencegah terjadinya deforestasi dan kebakaran hutan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang setiap tahun terjadi kebakaran hutan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan memiliki hutan yang luas dan telah lama dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, dari hutan yang dimiliki tersebut menimbulkan permasalahan yang sering terjadi yaitu deforestasi dan kebakaran hutan. Sehingga isu-isu deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi setiap tahun dengan intensitas kebakaran hutan yang tinggi. Permasalahan-permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Adanya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan timbulnya kabut asap dan polusi udara yang telah menimbulkan dampak ke beberapa negara di Asia Tenggara. Di mana dampak bagi Thailand akibat kabut asap tersebut membuat industri pariwisata Thailand bermasalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Rational Choice* yang dikeluarkan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politics: Model of Decision Making Process*. Penulis melihat bahwa teori ini dapat dijadikan sebagai dasar analisis penelitian dan menganalisis kebijakan luar negeri Thailand terhadap analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Penulis mengklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan teori ini yaitu dengan melihat melalui tiga indikator dalam teori *rational choice*, yaitu: kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Adanya deforestasi dan kebakaran di Indonesia menimbulkan terjadi permasalahan secara signifikan. Sebab deforestasi dan kebakaran hutan tersebut secara langsung kabut asap lintas batas negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Deforestasi dan kebakaran hutan telah menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Kabut asap ini terjadi karena diakibatkan oleh adanya deforestasi dan kebakaran hutan yang sangat parah di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah Thailand telah melakukan penanggulangan dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Thailand bersama negara Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun regional dalam hal ini melakukan kerja sama yang diharapkan dapat menanggulangi dampak dari kabut asap yang terjadi. Sebab dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa.

Dengan menggunakan analisis *Rational Choice Theory*, maka dari itu dalam merespon kebakaran hutan yang berdampak di Thailand dan bertanggung jawab yaitu: birokrat dalam hal ini kementerian, partai politik dalam hal ini aktor politik, kelompok yang berkepentingan, dan media massa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan objektif yang juga objektifitas ini sesuai menggambarkan kepentingan Thailand. Sehingga keempat variabel ini memiliki peran yang sangat penting dalam menganalisis kondisi politik domestik thailand.

Kemudian dalam konteks ini yaitu kondisi ekonomi, keamanan, dan konteks internasional telah mendorong Thailand dalam meraih kepentingannya terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Di mana dalam hal ini yaitu:

Pertama, ekonomi yaitu adanya kabut asap lintas batas negara yang bersumber dari kebakaran hutan di Indonesia telah berdampak terhadap kondisi domestik Thailand. Di mana dampak tersebut berpengaruh pada kondisi domestik Thailand yaitu pada sektor ekonomi, pariwisata dan kesehatan. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas negara memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia maupun negara Asia Tenggara. Di mana Thailand merupakan salah satu negara yang terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia.

Kedua, keamanan dan militer yaitu meninjau aspek militer dan keamanan yang juga mendorong munculnya keinginan Thailand untuk segera meminta Indonesia menyelesaikan masalahnya (deforestasi) karena dampak dari masalah tersebut hingga ke Thailand. Hal ini artinya menghendaki kondisi keamanan negara seperti yang digambarkan diatas, bahwa secara kekuatan militer Thailand merupakan negara salah satu negara dengan nilai kekuatan militer tertinggi di ASEAN. Dengan kata lain proses pembuatan kebijakan Thailand terhadap Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan Deforestasi dan kebakaran hutan menjadi tegas karena aspek militer mendukung pola perumusan kebijakan ini, dengan kata lain bahwa aspek militer sifatnya *defence* bahwa bukan untuk menyerang atau angkat senjata melainkan sebagai *back up* perumusan kebijakan, secara teori hal ini dimungkinkan karena secara psikologis kebijakan yang dikeluarkan akan gertakan psikologis yang memuat pihak kedua (dalam hal ini Indonesia) mempertibangkan kemauan Thailand (untuk segera mengatasi permasalahan asap).

Ketiga, konteks internasional yaitu Thailand menjadi salah satu negara yang ikut aktif dalam menangani kabut asap kiriman dari Indonesia. Thailand juga sangat intens membangun komunikasi dan membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Thailand juga ikut meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*

(AATHP). Selain itu, Thailand turut membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Sehingga melihat juga kondisi Thailand yang juga terkena dampak akibat kabut asap lintas batas negara yang merupakan kiriman dari Indonesia. Maka, kondisi internasional sangat mempengaruhi Thailand dalam memutuskan kebijakan luar negerinya. Thailand dalam kebijakan luar negerinya memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan adanya kabut asap lintas batas negara.

4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan rumusan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis dalam menindaklanjuti hasil penelitian ini, memberikan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini berjudul analisis analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sehingga kedepannya bagi kalangan peneliti atau akademisi meneliti terkait topik ini. Sebab topik ini sangat menarik karena berhubungan permasalahan kabut asap lintas batas negara yang terjadi Indonesia. Selain itu, agar menambah referensi bagi peneliti atau akademisi yang mengambil topik terkait bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dalam menyelesaikan permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asa lintas batas negara.
2. Kerja sama antara Indonesia dengan Thailand dalam analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sebab adanya kabut asap lintas batas negara merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan kerja sama anatar negara. Sehingga bagi

kalangan akademisi agar terus melakukan penelitian terkait kerja sama penanganan kabut asap lintas batas negara baik itu dilakukan oleh Indonesia, maupun Thailand.

Dengan demikian, penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya dapat membahas perkembangan kerja sama antara Indonesia dengan Thailand dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas negara lebih lanjut lagi. Hal ini mengingat kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sehingga di masa yang akan datang pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini memiliki banyak referensi.



DAFTAR PUSTAKA

ASEAN. (2002). ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION.

Retrieved September 2019

Azizah, N. (1992). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia dalam Prospektif 4*. Jakarta: Rand McNally Pub. Co.

Birgit Lode, P. S. (2016). Clean Air for All by 2030? Air Quality in the 2030 Agenda and in International Law. 4. Retrieved September 2019

Chitradon, B. (2007, Maret 22). *Southern extremists learning from bin Laden*. Retrieved Oktober 3, 2019, from Bangkok Post: <http://pages.citebite.com/g1w4a0a6y2ssu>

Cole John, S. S. (2015, August 11). *Thai army: new line-up, same fault-lines*. Retrieved Oktober 3, 2019, from Asia Times: https://www.asiatimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-011013.html

Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Dagun, M. S. (2006). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Dauvergne, P. (2004). The Politics of Deforestation in Indonesia. *Pacific Affairs*, LXVI(4), 497-518.

Domínguez, G. (2015, Oktober). *Haze affecting Thai tourism industry*. Retrieved Agustus 2019, from <https://www.dw.com>: <https://www.dw.com/en/haze-affecting-thai-tourism-industry/a-18801663>

Edwards, S. A., & Heiduk, F. (2015). Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environment Security Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, XXXIV(3), 65-94.

Goldammer, H. &. (2001). Smoke-Haze Pollution: A Review of the 1997 Episode in Southeast Asia. *Regional Environment Change*, 2, 24-7. Retrieved September 2019

Heilmann, D. (2015). After Indonesia Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environment Governance Tool. *Journal Of Current Sotheast Asian Affairs*, XXXIV(3), 95-121.

Hubbusyuhada, M. H. (2018, Desember). Faktor Determinan Kebijakan Luar Negeri Singapura dalam Kasus Kebakaran Hutan Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, VII(3), 297-307.

Kompas. (2015, Oktober 22). *Kabut Asap Terburuk Selimuti Thailand*. (E. Patnistik, Editor) Retrieved Aril 7, 2019, from Kabut Asap Terburuk Selimuti Thailand: <https://internasional.kompas.com/read/2015/10/22/15160781/Kabut.Asap.Terburuk.Selimuti.Thailand>

Kuwinpant, P. (2002). *Thai Society and Culture*. Nagoya: Nagoya University. Retrieved November 2019, from https://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/OFW2008_Thai_Society_by_ProfPreecha.pdf

Lefevre, A. S. (2018, Februari 22). *Greenpeace appeals to Thai PM to tackle air pollution 'crisis'*. Retrieved November 31, 2019, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-weather/greenpeace-appeals-to-thai-pm-to-tackle-air-pollution-crisis-idUSKCN1G60L3>

Muhaimin. (2018). Retrieved April 27, 2019, from <https://international.sindonews.com/read/1288966/40/indonesia-nomor-10-importir-senjata-terbesar-di-dunia-1520844422>

Nn. (2007, Januari 5). *Coup leaders tighten grip*. Retrieved Oktober 3, 2019, from The Nation: http://www.nationmultimedia.com/2007/01/05/headlines/headlines_30023343.php

Nn. (2007, Januari 1). *Surayud qualifies remarks about bombers*. Retrieved Oktober 3, 2019, from The Nation: http://www.nationmultimedia.com/2007/01/04/national/national_30023239.php

Nn. (2007, January 1). *Thai PM blames rivals for blasts*. Retrieved Oktober 03, 2019, from BBC: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6222013.stm>

Othmad, J. (1999). Cost of Trans-boundary Haze Externalities. *Jurnal Ekollomi Malaysia*, 33, 3. Retrieved September 2019

Pardomuan, L. (2014, Februari). *Top rubber producers again eye joint moves to arrest sliding prices*. Retrieved September 2019, from reuters.com: <https://www.reuters.com/article/rubber-producers/top-rubber-producers-again-eye-joint-moves-to-arrest-sliding-prices-idUSL3N0LB1CP20140207>

Parwito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

Ping, X. (2011). Environmental Problems and Green Lifestyles in Thailand. Retrieved Agustus 18, 2019, from https://www.nanzan-u.ac.jp/English/aseaccu/venue/pdf/2011_05.pdf

Primus, J. (2014, Maret 21). *Kompas*. Retrieved Oktober 18, 2019, from Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Chiang Mai: <https://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/1737507/Kabut.Asap.Ganggu.Penerbangan.di.Chiang.Mai>

Rappa, A. L. (2018, April 10). *The King and the Making of Modern Thailand*. Abingdon. Retrieved Oktober 03, 2019, from <https://books.google.co.th/books?id=lAm9DgAAQBAJ&pg=PT92&lpg=PT92&dq=inactive+post+thailand&source=bl&ots=lKGjtuHqGr&sig=ozfyVTQGlEuAmYJAB5hHXq2EOmA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLjoiW0I3ZAhVBqY8KHUIaDdQQ6AEIUzAI#v=onepage&q&f=false>

Rayanakorn, M. (2010). Haze and air pollution in Chiang Mai (in Thai). *Public Policy Institute*, 50. Retrieved Agustus 18, 2019

Robert D.Field, Y. W. (2004). A drought-based predictor of recent haze events in western Indonesia. Retrieved September 2019

Rumajomi, H. B. (2006). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. *Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS702)*, 1-24.

Sambodo, M. T. (2015). Indonesia has Ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Will the Haze Disappear? *Economic Research Center Indonesia Institute of Sciences (PsEkonomi LIPI)*, VI(1), 1-28.

Sarosi, D. (2017, Oktober). *Tourism's Dirty Secret; The Exploitation of Hotel Housekeepers*. Retrieved Agustus 2019, from Oxfam: <https://www.oxfam.ca/publication-type/report/>

Singapore Institute of International Affairs. (2016). Southeast Asia's Burning Issue: From the 2015 Crisis to a More Robust System. *Singapore Institute of International Affairs*.

Suchat, S. (2018, Juli). *A Fatal Wake-up Call*. Retrieved Agustus 2019, from Bangkok Post: <https://www.bangkokpost.com/business/1504234/a-fatal-wake-up-call>

Suryani, A. S. (2012, Januari 1). Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Aspirasi*, III(1), 59-75.

Syaifulloh, M., Susilo, D., & Soelistijono, A. P. (2013). Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2012*, 1-6.

Tacconi, L. (2003). Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. *Centre for International Forestry Research*, I(38), 1-26.

Tanjung, B. H. (2016, Juli 16). *Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Akibat Ulah Manusia*. Retrieved Maret 3, 2019, from Okezone News: <https://news.okezone.com/read/2016/07/16/340/1439317/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-riau-akibat-ulah-manusia>

The Thaiger & The Nation. (2019, Oktober 5). *Thai PM says Cabinet is adding new pollution controls, while academic finds solutions ineffective*. Retrieved Oktober 6, 2019, from thethaiger.com: <https://thethaiger.com/hot-news/air-pollution/thai-pm-says-indonesian-government-promises-to-control-air-pollution-from-forest-fires>

Varkkey, H. (2013, May). Regional cooperation , patronage and the ASEAN Agreement on transboundary haze pollution. *Springer Netherlands*, 65. Retrieved September 2019

Varkley, H. (2013). Patronage politics, plantation fires and transboundary haze. *Journal Environmental Hazards*, XII(3-4), 200-217.

WHO. (2012). Air Pollution. *Media Center*. Retrieved Agustus` 18, 2019

Willett, D. L. (2018, Februari). *Thailand's Spending Spree*. Retrieved Oktober 2019, from asianmilitaryreview: <https://asianmilitaryreview.com/2018/02/thailands-spending-spree/>

Wirawan, J. (2015, Oktober 8). *Prihatin dengan kabut asap, Thailand tawarkan bantuan kepada Indonesia*. Retrieved Oktober 14, 2019, from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151008_indonesia_thailand_asap

